

MINAT DAN PILIHAN POLITIK ORANG KRISTEN INDONESIA 1955 - 2009

Sebuah Kajian Historis-teologis

Jan S. Aritonang

Sekolah Tinggi Teologi, Jakarta

Abstrak:

The presence of Christianity in Indonesia was connected very much with political interest and goal by some European nations. But not until the end of the 19th century the indigenous Christians involved in political life and showed their interest in political matters. From the beginning of the 20th century some Christian political parties emerged gradually and one of the strongest was Parkindo (Indonesian Christian Party). This article aims to show the political interest, inclination and option of the Indonesian Christians, esp. during the general election, from 1955 up to 2009, through a historical as well as theological perspective.

Keywords: politik praktis, orang Kristen Indonesia, partai politik Kristen, Pemilu.

Dalam sekitar sepuluh tahun terakhir ini, yaitu sejak awal 'era Reformasi', minat orang Kristen di Indonesia di bidang politik¹, d.h.i. politik praktis, yang a.l. ditandai oleh pembentukan sejumlah partai politik berlabel Kristen, pencalonan diri menjadi anggota DPR/DPRD dan DPD

-
- 1 Istilah 'politik' memiliki cakupan pengertian yang sangat luas. Dalam arti yang paling generik, politik berarti hal-hal mengenai kehidupan bersama antar sesama manusia, ataupun hal-hal mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002, h. 886), arti *politik* a.l. adalah (1) [pengetahuan] mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan; (2) segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Dalam tulisan ini yang politik dibatasi pada *politik praktis*, yakni aktivitas, keterlibatan ataupun pilihan di dalam atau melalui organisasi politik tertentu. Dalam hal ini subjeknya adalah orang Kristen Indonesia, termasuk Katolik, tetapi lebih banyak menyangkut yang non Katolik. Kiprah politik kalangan Katolik Indonesia sebelum Indonesia merdeka diulas a.l. dalam karya dua jilid Karel A. Steenbrink, *Orang-orang Katolik di Indonesia* (terj.) (Maumere: Ledalero, 2006-2007). Kiprah politik kalangan Katolik Indonesia sebelum hingga sejak Indonesia merdeka dapat ditemukan secara sporadis dalam Jan S. Aritonang & Karel A. Steenbrink (eds.), *A History of Christianity in Indonesia* (Leiden: Brill, 2008).

di dalam serangkaian Pemilihan Umum (Pemilu), dan pertarungan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) meningkat tajam. Minat itu memang tidak muncul tiba-tiba, tetapi peningkatannya akhir-akhir ini sangat signifikan, bahkan cukup mencengangkan, sehingga menarik untuk dikaji.

Minat dan keterlibatan orang Kristen Indonesia dalam politik praktis belumlah terlalu lama. Cikal-bakalnya baru tampak sejak akhir abad ke-19, dan realisasinya baru semakin nyata sejak medio abad ke-20. Dalam tulisan ini pertama-tama akan ditelusuri latar belakang dan perkembangan minat itu, termasuk kecenderungan dan pilihan politik orang Kristen di negeri ini. Perhatian utama akan dipumpunkan pada minat dan pilihan pada partai-partai politik peserta Pemilu, sejak 1955 hingga 2009. Sehubungan dengan itu akan disajikan juga latar belakang dan dasar pertimbangan teologis, demikian juga dampaknya - secara positif maupun negatif - bagi partisipasi dan sumbangan politik orang Kristen bagi bangsa ini. Kiprah pada kurun waktu terakhir, yang lazim disebut 'Era Reformasi' akan mendapat perhatian khusus pada bagian ketiga, karena pada kurun waktu inilah minat atau - meminjam istilah Hotman Siahhan - syahwat politik² orang Kristen Indonesia sangat meningkat.

1. Latar Belakang Minat Politik Orang Kristen Indonesia

Kiprah orang Kristen di bidang politik di Indonesia, kendati baru secara tidak langsung atau secara pasif, sudah terjadi sejak kehadiran Gereja di negeri ini, yakni sejak awal abad ke-16.³ Dikatakan begitu karena kehadiran Gereja (d.h.i. Gereja Katolik Roma) sejak waktu itu tidak terlepas dari kiprah politik dari bangsa-bangsa penjajah, yaitu Portugis dan Spanyol. Hal itu kemudian dilanjutkan oleh Belanda/VOC yang Protestan pada kurun waktu 1602-1799. Pada masa itu Gereja (termasuk para pemimpinnya) diatur oleh penguasa/penjajah dan karena itu Gereja pada umumnya mengikuti saja apa yang dikehendaki penguasa. Tetapi yang berkiprah itu terutama adalah orang Kristen asal Eropa, bukan dan belum Kristen pribumi.

Khusus di lingkungan gereja-gereja Protestan, sebagian besar gereja yang terbentuk sejak awal abad ke-19 adalah hasil pekerjaan zending (badan-badan penginjilan) yang datang dari Inggris, Belanda dan Jerman, didorong oleh semangat Pietisme (kesalehan dan kesucian hidup) dan

-
- 2 Demikian Prof. Dr. Hotman Siahhan, guru besar Sosiologi pada Universitas Airlangga - Surabaya, dalam ceramahnya pada Konferensi Gereja dan Masyarakat yang diselenggarakan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), 17-21 November 2008 di Cipayung - Bogor.
 - 3 Sebenarnya Gereja Kristen [Nestorian] sudah hadir di negeri ini sejak abad ke-7, tetapi karena kemudian punah dan tidak berkesinambungan dengan gereja-gereja yang ada sekarang, maka gereja itu tidak kita bicarakan di sini.

Revival (kebangunan rohani). Badan-badan zending itu pada umumnya berpendapat bahwa politik adalah bidang kehidupan yang duniawi dan kotor, sehingga warga gereja atau orang Kristen pribumi yang mereka asuh tidak dianjurkan (untuk tidak dikatakan dilarang) terjun dan berkiprah di bidang politik. Badan-badan zending itu pada umumnya mengaku bersikap a-politis, tetapi dalam kenyataannya banyak juga dari mereka yang mendukung politik dari pemerintah negara-asal mereka, yaitu para penguasa kolonialis-imperialis. Hanya ada satu badan zending yang mendorong warganya terjun di bidang politik praktis, yaitu Zending-GKN (*Zending der Gereformeerde Kerken in Nederland*/Gereja Gereformeerd Belanda), karena pemimpin gereja ini adalah seorang politikus, bahkan pernah menjadi Perdana Menteri Belanda, yaitu Abraham Kuyper.

Sejak akhir abad ke-19 di kalangan Kristen pribumi mulai timbul kesadaran untuk berkiprah di bidang politik, dan mereka itu sebagian berasal dari gereja hasil karya Z-GKN, yakni gereja yang terbentuk di Jawa Tengah (selain yang terbentuk di Jawa Timur). Mereka mula-mula mendirikan organisasi lokal: Rencono Budiyo (1898 di Mojowarno) yang kemudian berubah menjadi Mardi Pracoyo (1912, juga di Mojowarno).⁴ Sejak 1918 Mardi Pracoyo ditingkatkan menjadi organisasi politik dengan nama Perserikatan Kaum Christen (PKC).⁵ Karena masih berifat lokal (Jawa), PKC kurang berkembang. Kendati pada 1930 PKC direvitalisasi, tetapi karena tetap bersikap loyal kepada penguasa kolonial – sama seperti *Christelijke Etische Partij/Christelijke Statkundige Partij*, partai Kristen yang didirikan oleh orang Belanda di negeri ini – maka dukungan masyarakat Kristen pribumi, yang sudah semakin dibakar oleh semangat kebangsaan dan kemerdekaan, sangat terbatas.

Pada tahun 1930 sejumlah orang Kristen pribumi dari berbagai suku dan daerah membentuk partai politik baru yang berjiwa kebangsaan, yaitu Partai Masehi Indonesia (PMI), yang kemudian berubah menjadi Partai Kaum Masehi Indonesia (PKMI). Toh PMI/PKMI tidak bisa membebaskan diri dari sikap loyal/kooperatif kepada pemerintah kolonial, dengan alasan bahwa PMI suka bekerjasama dengan pemerintah yang sah dan pemerintah kolonial Belanda sedang mempersiapkan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan.⁶ Akibatnya banyak politikus

4 Uraian singkat tentang Rencono Budiyo dan Mardi Pracoyo, lihat dalam Jan S. Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), 190-195, dan A.G. Hoekema, *Berpikir dalam Keseimbangan yang Dinamis* (terj.) (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997), 147-148 dan 168.

5 Uraian singkat tentang PKC lihat a.l. dalam Jan S. Aritonang, "Kiprah Kristen dalam Sejarah Perpolitikan di Indonesia", dalam *Jurnal Teologi Proklamasi*, edisi no. 4/Th. 2/September 2003, 12-14.

6 Zakaria Ngelow, *Kekristenan dan Nasionalisme* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994), 81-88.

Kristen - a.l. Arnold Mononutu, Alexander Maramis, Amir Sjarifuddin, A.J. Patty, dan Sam Ratulangi⁷ - yang lebih suka bergabung dalam partai nasionalis-sekuler, a.l. Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo), walaupun mereka tidak samasekali anti terhadap partai politik bercorak Kristen.

Pada zaman Jepang tidak ada partai politik Kristen yang dapat berkiprah secara legal, karena partai-partai Kristen yang ada sebelumnya tadi dianggap sebagai loyalis terhadap pemerintah kolonial Belanda yang sangat dimusuhi oleh Jepang. Tetapi cukup banyak tokoh Kristen yang tetap berkiprah di bidang politik melalui partai-partai nasionalis-sekuler. Dari antara mereka ada yang nyata-nyata menyatakan dukungan atau menjilat kepada penguasa Jepang (mis. Mr. Elkana Tobing dan J.T. Assa), tetapi ada yang tetap menjaga jarak dan menunjukkan sikap kritis (mis. Amir Sjarifuddin dan Sam Ratulangi).⁸

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, pemerintah RI mengeluarkan maklumat, mempersilahkan kekuatan-kekuatan politik untuk membentuk partai. Para politisi Kristen tidak mau ketinggalan; tanggal 10-11 November 1945 sejumlah tokoh Kristen - Protestan maupun Katolik - berkumpul di Kramat Raya 65 untuk membicarakan kemungkinan membentuk satu partai yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi umat Kristen di Indonesia. Karena kalangan Katolik tidak bisa segera menentukan sikap, kalangan Protestan bersepakat membentuk partai sendiri; semula diberi nama Partai Kristen Nasional (PKN) dan sejak kongres pertama PKN 6-7 Desember 1945 diubah menjadi Partai Kristen Indonesia (**Parkindo**). Dasar partai ini adalah Kitab Suci (Alkitab), sedangkan tujuannya adalah mempertahankan RI ke luar dan ke dalam, membantu RI mencapai perdamaian dunia, dan mengusahakan keadilan.

Selain Parkindo, yang memang lebih langsung berperan menyalurkan aspirasi politik umat Kristen, salah satu lembaga Kristen [Protestan] yang memperlihatkan perannya di bidang politik pada masa ini adalah **Dewan Gereja-gereja di Indonesia** (DGI). Memang DGI, yang berdiri tanggal 25 Mei 1950, bukanlah lembaga politik, namun ia sedikit-banyak mengemban tugas yang bersifat politis dalam arti luas, yaitu mewakili gereja-gereja anggotanya berbicara dengan pemerintah untuk menyampaikan aspirasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik

7 Uraian komprehensif tentang cita-cita dan kiprah politik Amir Sjarifuddin, Soegijapranata, I.J. Kasimo, Todung Sutan Gunung Mulia, dan G.S.S.J. Ratulangie adalah tulisan Geert A. van Klinken, judul *Minorities, Modernity and the Emerging Nation - Christians in Indonesia, a biographical Approach* (Leiden: KITLV, 2003).

8 Penjelasan tentang kiprah politik orang Kristen Indonesia pada masa pendudukan Jepang lihat a.l. dalam Jan S. Aritonang, *Sejarah Perjumpaan*, 225-235.

yang menyangkut urusan dan kepentingan gereja atau umat Kristen pada khususnya, maupun menyangkut berbagai perkara di tengah kehidupan bangsa dan negara pada umumnya. Karena itu hubungan antara Parkindo dan DGI pada periode ini terjalin sangat erat.

2. Minat dan Pilihan Politik Orang Kristen Indonesia Pemilu 1955-1997

Pemilu 1955

Aspirasi politik umat Kristen Indonesia pada periode 1950-an terutama diwakili oleh Parkindo (yang didukung DGI), kendati banyak juga tokoh beragama Kristen menempatkan diri di kalangan nasionalis. Hubungan di antara dua lembaga ini makin tampak ketika Parkindo dan DGI berhadapan dengan sejumlah peristiwa politik, misalnya pada saat DGI mendukung Parkindo menjelang dan dalam kampanye Pemilu 1955. Dukungan DGI terhadap Parkindo itu sudah terlihat dalam seruan Sidang Lengkap III DGI tanggal 1 Juli 1953 (walaupun tidak secara eksplisit menyebut Parkindo). Di situ a.l. diserukan:

1. Supaya seluruh anggota Gereja-gereja Kristen di Indonesia ... yang berhak memilih, akan turut dengan aktif memilih dan melaksanakan Pemilihan Umum untuk Constituante.
2. Supaya pemilih-pemilih dapat dipimpin kepada memilih calon-calon yang berdasar pada kepercayaan Gereja Kristen, sanggup dan paham memprjuangkan kepentingan masyarakat umum dan kepentingan umat Kristen khususnya.

Seruan ini kemudian disusul dengan seruan dari Sidang Gereja Am Luar Biasa Gereja Protestan di Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1955 dan seruan-seruan senada dari gereja-gereja lain.

J.C.T. Simorangkir, salah seorang tokoh Parkindo yang sangat menonjol peranannya pada periode Orde Lama, mencatat sbb.⁹:

Pemilihan Umum 1955 ternyata bukan hanya persoalan partai saja, dalam hal ini partai Kristen, namun gereja pun turut "menanganinya". Sekalipun bukan (belum jadi) anggota terdaftar Parkindo, namun menjelang Pemilihan Umum 1955 pengamat sejarah kepartaian di Indonesia dapat mencatat bahwa banyak pemuka gereja (pendeta, voorganger, pengetua, sintua, dan sebagainya) yang dalam soal Pemilihan Umum sejajar pendapat dan sikapnya dengan pimpinan partai Kristen. Di beberapa tempat persoalan Parkindo menjadi bahan pembicaraan dalam kamar-kamar konsistori. Pengumuman Parkindo dapat menempelkan diri pada papan pengumuman gereja. Ada kalanya di

9 J.C.T. Simorangkir, *Manuscript Sejarah Parkindo* (Jakarta: Yayasan Komunikasi, 1989), 117-118.

tempat-tempat tertentu, penjelasan Parkindo kepada anggota gereja dapat dilangsungkan dalam gereja itu sendiri (biasanya sehabis kebaktian, sekalipun pada prinsipnya tidak dikehendaki oleh pimpinan partai).

Khusus mengenai hubungan akrab Parkindo dan DGI, Simorangkir melukiskannya sbb.:

Apabila DGI misalnya suatu ketika menghadapi persoalan tertentu yang ada kaitannya dengan persoalan kemasyarakatan/kenegaraan yang langsung atau tidak langsung dihadapi oleh para anggota/warga gereja, maka ada kalanya DGI mengundang orang-orang Parkindo, yang pada saat yang sama adalah pula anggota/warga sesuatu gereja, untuk turut memberikan pandangan dan pemikirannya mengenai persoalan yang dihadapi DGI itu. Sebaliknya acap kali Parkindo berhubungan dengan orang-orang DGI apabila menghadapi persoalan-persoalan yang memerlukan pemikiran teologis.¹⁰

Dr. J. Leimena memakai gambaran lain: "Kalau gereja berdiri di tengah-tengah lapangan, maka di sekitar lapangan itu, sebagai pagar penjaga, berdirilah Parkindo dengan ormas-ormas Kristen lainnya untuk menjaga gereja yang jadi pusat hidup orang-orang Kristen di Indonesia itu."¹¹

Tentang kerjasama gereja Protestan dan Parkindo pada masa Pemilu 1955 ini, Webb juga memberi ilustrasi yang tak kalah menarik, sebagaimana a.l. terjadi di Depok. Masyarakat di sana, yang mayoritas Kristen, dikelilingi umat Islam yang berusaha mempengaruhi secara agresif untuk memilih Masyumi. Tetapi pendeta setempat mengatakan tidak, melainkan harus memilih partai Kristen (Parkindo). Lalu gereja/pendeta memperlengkapi mereka dengan pemahaman tentang politik dan tentang partai Kristen. "They should vote for their religion and their religion's party." Webb juga menyebut contoh-contoh lain di Sulut dan Tapanuli Utara. Tetapi ia juga mencatat bahwa orang Kristen Protestan tidak hanya memilih atau bergabung dalam Parkindo, melainkan juga di PKI dan PNI. Banyak orang Kristen memilih PKI, karena partai ini berkampanye bahwa Komunis akan mencegah didirikannya negara Islam di Indonesia.¹²

Walaupun gereja-gereja Protestan telah ikut mendukung Parkindo, ternyata dalam Pemilu secara nasional yang berlangsung dua tahap ini, yakni 29 September 1955 untuk pemilihan anggota Parlemen dan 15 Desember 1955 untuk Konstituante, suara yang diperoleh Parkindo tidak cukup besar. Dari sekitar 37,8 juta suara yang sah (di antara sekitar 43 juta pemilih yang terdaftar), Parkindo hanya memperoleh 2,6 % suara

10 *Ibid.*, 310.

11 *Ibid.*, 311.

12 R.A.F. Webb, *Indonesian Christians and Their Political Parties 1923-1966: The Role of Parkindo and Partai Katolik*. (Townsville: James Cook University, 1978), 72-75.

(sekitar satu juta) baik untuk Parlemen maupun Konstituante, sedikit lebih besar dari yang diperoleh partai Katolik, yakni 2 %. Suara itu terutama diperoleh di daerah-daerah yang persentase penduduk beragama Kristen cukup besar, misalnya Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Maluku, dan NTT.¹³ Jumlah ini agak kecil dibanding jumlah orang Kristen Protestan di Indonesia pada waktu itu (sekitar 4-5 persen dari seluruh penduduk). Seperti telah disinggung di atas, banyak juga orang Kristen Protestan yang memilih partai-partai lain, termasuklah PNI yang memperoleh 22,3 % suara dan PKI (yang baru diizinkan aktif kembali setelah pemberontakannya di Madiun 1948) yang memperoleh 16,4 %.¹⁴ Hasil ini sekaligus memperlihatkan bahwa banyak orang Kristen menyalurkan aspirasi politiknya melalui partai-partai yang tidak berlabel keagamaan. Bagaimanapun juga, jumlah 2,6 % di atas merupakan perolehan terbesar yang pernah dicapai oleh sebuah partai Kristen di dalam Pemilu, pun hingga Pemilu 2009.

Sulit diukur, seberapa besar peranan para pemilih yang beragama Kristen untuk membuat partai-partai Islam tidak berhasil menang. Namun patutlah dicatat betapa seriusnya perjuangan wakil-wakil mereka di Parlemen maupun Konstituante – bahu membahu dengan kalangan nasionalis – untuk mempertahankan Pancasila seraya membendung upaya kalangan Islam untuk memulihkan Piagam Jakarta dan mencantumkan Syariat Islam dalam dasar negara. Ucapan Pdt. W.J. Rumambi dari Parkindo pada salah satu sidang Konstituante di tahun 1957 dapat dikutip sebagai contoh argumen tentang kenapa dan bagaimana kalangan Kristen mempertahankan Pancasila:

Sudah barang tentu kami tinjau itu berdasar pada keyakinan kami sebagai orang-orang Kristen. Kami buat itu karena kami merasa turut bertanggungjawab atas keselamatan dan kebahagiaan negara Indonesia. Tanggungjawab itu pertama-tama terhadap Tuhan kami, dan selanjutnya terhadap sesama manusia. ... Tugas kami umat Kristen di Indonesia dalam lapangan kenegaraan ialah turut mengusahakan kesejahteraan, perdamaian, keadilan dan ketertiban untuk seluruh rakyat Indonesia dan bukan saja untuk golongan umat Kristen di Indonesia, baik dengan kata maupun dengan perbuatan, berdasar pada rencana keselamatan Tuhan kami yang nyata dalam Kitab Suci kami; Yesus Kristus adalah Juruselamat dunia, demikian juga Juruselamat Indonesia. Ini keyakinan kami.

Jika umpamanya Kristen dijadikan dasar daripada suatu negara, maka kedudukan daripada agama yang suci itu yang kekal dan abadi itu, direndahkan menjadi setara dengan hal-hal yang ada dalam dunia ini, sehingga terjadilah sekularisasi atau penduniawian. ... Jika agama menjadi

13 Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia* (terj.) (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999), 8, 84-85, 99-103, 115.

14 Bnd. *ibid.*, 118.

dasar negara, maka besar sekali kemungkinan agama itu dijadikan alat pertarungan kuasa-kuasa politik dalam dunia ini, agama menjadi sama dengan ideologi-ideologi duniawi. ... Fraksi kami tidak dapat menerima Islam sebagai dasar negara Indonesia, walaupun kami sangat menghargai pikiran-pikiran yang tercantum di dalamnya. Karena selain daripada apa yang kami telah uraikan tadi, Islam sebagai dasar negara itu pasti tidak diterima di beberapa daerah di Indonesia ini umpamanya di Minahasa, Sangir Talaud, Poso, sebagian Toraja, sebagian besar dari daerah Tapanuli, Sumba, Timor, sebagian dari Maluku, dan Irian Barat.¹⁵

Pemilu 1971

Karena berbagai gejala politik, setelah Pemilu pertama 1955 hingga berakhirnya kekuasaan Soekarno tahun 1966 Pemilu berikutnya tidak dapat berlangsung. Setelah Soeharto memegang kekuasaan dan menyebut rezimnya sebagai Orde Baru, segera muncul usul bahkan desakan - terutama dari kalangan Islam - untuk secepatnya menyelenggarakan Pemilu. Usul itu bahkan ditampung MPRS dalam salah satu ketetapanannya, bahwa Pemilu harus dilaksanakan selambat-lambatnya 5 Juli 1968. Tetapi karena berbagai alasan dan pertimbangan, terutama agar Soeharto dan rezimnya (melalui Golkar) dapat memastikan diri sebagai pemenang, Pemilu kedua di negeri ini baru dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1971.

Pada Pemilu ini, sama seperti pada Pemilu 1955, masih cukup banyak partai peserta, termasuk yang berlabel agama, termasuklah Parkindo. Sementara itu pada dasawarsa 1960-an jumlah umat Kristen (Protestan maupun Katolik) cukup banyak bertambah dibanding dengan dasawarsa 1950-an, yaitu menjadi sekitar 6 dan 3 persen dari jumlah penduduk. Hal itu antara lain merupakan dampak dari gagalnya G-30-S/PKI, yang membuat banyak orang takut dicap Komunis lalu banyak yang memilih menjadi Kristen. Pada Pemilu ini masih banyak juga gereja yang mendukung Parkindo, walaupun tidak segegar dukungan pada Pemilu 1955. Tetapi ternyata suara dan kursi di DPR yang diperoleh Parkindo secara nasional merosot sekitar separonya dibanding Pemilu 1955, yaitu hanya 1,34 %.¹⁶ Memang di daerah-daerah tertentu yang jumlah penduduknya Kristennya cukup besar (lihat di atas) persentase pemilih Parkindo masih cukup tinggi, tetapi tidak setinggi pada Pemilu 1955. Kebanyakan justru memilih Golongan Karya (Golkar) yang merupakan partai pemerintah (walaupun secara resmi tidak disebut sebagai partai politik).

Berbarengan dengan upaya pemerintah membesarkan Golkar, pemerintah juga berupaya melemahkan kekuatan dan peranan partai-

15 *Risalah Perundangan Konstituante Republik Indonesia tahun 1957*, V, 444-445.

16 William R. Liddle, *Pemilu-Pemilu Orde Baru*. (Jakarta: LP3ES, 2 1994), 46.

partai politik yang telah ada. Salah satu caranya adalah melarang pegawai negeri menjadi anggota partai politik, serta mencanangkan “monoloyalitas”, yaitu tuntutan agar pegawai negeri memberi dukungan kepada pemerintah hanya melalui Golkar, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mendagri No. 12/1969 dan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1970. Secara legal-formal Golkar - yang dibentuk pada tanggal 19/20 Oktober 1964 - tidak disebut sebagai partai politik, tetapi secara faktual ia adalah partai politik, bahkan yang terbesar sejak 1971, dan dapat disebut sebagai partai politik pemerintah. Akibatnya, antara lain, pada Pemilu 1971 partai-partai Islam dan Kristen mengalami pukulan hebat, karena banyak warganya disedot oleh Golkar.

Pemilu 1977 - 1997

Sejak Pemilu 1977 hingga Pemilu 1997 tidak ada lagi Parkindo ataupun partai Kristen lainnya, karena pada tahun 1973 pemerintah melakukan penyederhanaan jumlah organisasi politik menjadi tiga, yaitu Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP, fusi partai-partai Islam), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Alasan yang dikemukakan pemerintah antara lain adalah untuk memperkecil sumber dan potensi konflik di tengah masyarakat, terutama di bidang politik. Tetapi sudah umum juga diketahui bahwa itu merupakan bagian strategi pemerintah untuk melemahkan peranan ideologi - termasuk yang berbau agama - di dalam partai-partai politik.

Semula direncanakan bahwa semua partai agama, yang Islam maupun yang Kristen, bergabung dalam Kelompok Spiritual, sedangkan partai-partai lain bergabung dalam Kelompok Nasionalis. Tetapi Parkindo dan Partai Katolik menolak bergabung dengan partai-partai politik Islam; Partai Katolik bahkan menyatakan dengan tegas, lebih baik bubar ketimbang bergabung dengan partai-partai Islam dalam Kelompok Spiritual. Tidak jelas dikemukakan alasan penolakan mereka, dan bisa saja ada yang menyayangkan sikap menolak itu, karena hal itu bisa dianggap sebagai melewatkan peluang untuk menyembuhkan luka-luka sejarah sekaligus membina hubungan yang lebih baik. Namun kita bisa menduga bahwa penolakan itu didasarkan pada pengalaman partai-partai Kristen dan Katolik sejak zaman penjajahan hingga zaman Orde Lama, yang berpuncak pada forum Konstituante, di mana mereka lebih sering berseberangan ketimbang bersepakat, terutama menyangkut hal-hal yang sangat mendasar.

Parkindo dan Partai Katolik selanjutnya, sejak tanggal 10 Januari 1973, memilih untuk berfusi bersama dengan PNI, IPKI dan Partai Murba di dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sejak saat itu para politikus Kristen berkiprah di dalam wadah PDI ataupun Golkar. Tetapi tidak semua tokoh Kristen dapat dengan mudah menerima fusi ini, terutama

ketika mereka dihadapkan pada pertanyaan: siapakah penyalur aspirasi politik Kristen dan dengan cara bagaimanakah aspirasi itu dapat diperjuangkan?

Pertanyaan itu antara lain digumuli oleh Martinus Abednego, salah seorang tokoh Parkindo yang kemudian menjadi Direktur Jenderal Bim-bingan Masyarakat (Kristen) Protestan yang pertama di Departemen Agama. Menjelang akhir masa hidupnya ia sempat mengungkapkan pergumulannya ini dengan menulis:

Parkindo bukanlah suatu partai politik yang mutlak dapat menentukan, karena dia bukanlah suatu partai yang besar. Tetapi sebagai partai kecil, Parkindo dapat berada dalam *wippositie* yang toh dapat menentukan sesuatu. Dan dengan dianutnya prinsip musyawarah di dalam masyarakat Indonesia, Parkindo dapat menyumbangkan sesuatu yang berguna sebagai garam dan terang ... Kini Parkindo tinggal nama, karena telah terlebur dalam Partai Demokrasi Indonesia ... Apakah dengan demikian terang yang dilambangkan dengan lilin itu dan makna pohon terang akan lenyap dari masyarakat? ... Siapakah yang akan memegang lilin itu dalam bidang politik? Gerejakah, atau pemimpin-pemimpin Parkindo yang sudah memasuki Partai Demokrasi Indonesia, atau oknum-oknum Kristen melalui organisasi politik yang bukan Parkindo lagi? Baik sekali jika setiap orang Kristen dapat menjawab pertanyaan ini dengan jelas dan tepat, sebab panggilan pelayanan Kristen dalam bidang politik adalah sesuatu yang mutlak, karena merupakan panggilan yang bersumber dari Tuhan sendiri.¹⁷

Suasana menjelang Pemilu 1977, terutama pada masa kampanye, ditandai oleh sejumlah ketegangan dan konflik. Mengacu pada penilaian sejumlah pengamat, Liddle (1994 : 32) mencatat bahwa penyebabnya terutama adalah “perbedaan antara apa yang dikatakan pemerintah dan apa yang dilakukannya, antara tekad yang diucapkan untuk membangun Demokrasi Pancasila dan persepsi umum tentang berbagai manipulasi yang dirancang untuk menjamin kemenangan pemerintah dan kekalahan oposisi”. Dari segi hasil secara kuantitatif, Golkar merebut 62,11 % suara, PPP meraih 29,29 %, sedangkan PDI sangat dirugikan dan mendapat jumlah suara terkecil, yaitu 8,6 %. Selain karena ‘dikerjai’ oleh Golkar dan para pejabat pemerintah, penyebab kecilnya suara yang diraih PDI juga adalah karena partai ini tidak memiliki ideologi yang koheren, yang

17 Martinus Abednego, “Suatu Partisipasi”, dalam Weinata Sairin dan Koernia Atje Soejana (peny.), *Selama Hari Masih Siang* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1976), 422-5. Setelah fusi itu, lambang Parkindo digunakan oleh Yayasan Komunikasi yang dibentuk oleh mantan pengurus Parkindo. Pada dasawarsa 1990-an sejumlah tokoh Kristen mendirikan Parkindo yang kepanjangannya adalah Partisipasi Kristen Indonesia, tetapi tidak sebagai partai politik, melainkan sebagai organisasi sosial-kemasyarakatan (ormas). Pada tahun 2000, pada era ‘Reformasi’, beberapa tokoh Kristen mendirikan kembali Parkindo sebagai partai politik, selain beberapa partai politik lain berlabel Kristen; tetapi belum sampai dua tahun sudah pecah.

mempersatukan lima partai yang berfusi di dalamnya, dan tidak memiliki tokoh sentral yang didukung oleh semua partai yang berfusi ke dalamnya.¹⁸

Gambaran kelangsungan dan hasil Pemilu 1982, 1987, 1992 dan 1997 lebih kurang sama dengan Pemilu 1977. Golkar – melalui rekayasa penguasa – selalu berhasil menang; bahkan jumlah suara yang diperolehnya meningkat pada hampir setiap Pemilu (misalnya: tahun 1977:62,1 %; tahun 1982: 64,3 %; tahun 1987: 73,2 %). Sementara itu suara yang diraih oleh PPP sebagai fusi partai-partai Islam cenderung menurun (1977: 29,3 %; 1982: 27,2 %, dan 1987: 16 %). Suara yang diraih PDI agak berfluktuasi, tetapi sebagian besar di bawah 10 %.¹⁹ Dan kian terlihat bahwa para politisi Kristen semakin banyak berkiprah di Golkar ketimbang di PDI, berbanding lurus dengan suara umat Kristen yang lebih banyak diberikan kepada Golkar.

Khusus pada Pemilu 1997, konflik – yang pada setiap Pemilu memang selalu terjadi, terutama antara para pendukung Golkar dan PPP – semakin meningkat, bahkan jauh sebelum masa kampanye. Konflik itu antara lain karena sebagian masyarakat sudah kian jenuh dengan kekuasaan otoriter Soeharto dan Golkar, yang a.l. juga terlihat melalui berbagai rekayasa dan manipulasi pada Pemilu-Pemilu selama ini, sementara Soeharto sendiri masih tetap dicalonkan oleh Golkar dan masih berhasrat melanjutkan kekuasaannya. Masa kampanye sering ditandai oleh kerusuhan, yang kadang-kadang membuat gedung gereja dan umat Kristen menjadi korban. Ini misalnya terlihat pada akhir masa kampanye di Banjarmasin, Pasuruan, Tangerang, dll. tanggal 23 Mei 1997, enam hari menjelang Pemilu (29 Mei 1997). Yang paling parah adalah di Banjarmasin, a.l. karena ada ratusan orang tewas terperangkap api di sebuah pasar swalayan. Yang mula-mula menjadi sasaran kemarahan umat Islam atau pendukung PPP adalah massa Golkar yang berkampanye pada hari itu, tetapi kemudian serangan juga diarahkan ke sejumlah gedung gereja dan sekolah Kristen, Protestan maupun Katolik, selain ke vihara Buddha, gedung perkantoran, dan pusat perbelanjaan. Boleh jadi karena kalangan Kristen dituding kalangan Islam sebagai pendukung Golkar.

Sebenarnya tudingan itu tidak sepenuhnya benar, apalagi kalau dialamatkan kepada kalangan Katolik. Sudah sejak bulan Februari 1997 Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) menerbitkan Surat Gembala Prapaskah yang memuat sejumlah catatan kritis terhadap berbagai peristiwa dan kebijakan pemerintah yang dinilai KWI bertentangan

18 Liddle, *Pemilu-Pemilu Orde Baru*, 42.

19 Bnd. tabel pada *ibid.*, 92.

dengan nilai-nilai moral, religius, maupun hak-hak asasi manusia. Khusus menyangkut Pemilu 1997, a.l. dinyatakan:

Pemilihan Umum yang bebas, jujur dan adil merupakan salah satu sarana penting pelaksanaan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu sikap meremehkan dan memanipulasi dan merekayasa Pemilihan Umum oleh pihak mana pun merupakan pelanggaran serius atas hak rakyat dan martabat warga negara, dan pada taraf tertentu dapat meniadakan kedaulatan rakyat itu sendiri.

Sebagai gembala, kami menyatakan bahwa umat Katolik hendaknya merasa betul-betul bebas untuk menentukan sikapnya dalam Pemilihan Umum itu. Anda bebas memilih mana di antara tiga kontestan Pemilihan Umum yang dianggap paling sesuai.

Kalau Anda sungguh-sungguh merasa tidak terwakili dan yakin dengan suara hati yang jernih dan kuat bahwa kedaulatan Anda tidak tersalurkan, kami dapat mengerti bahwa Anda mengungkapkan tanggungjawab dan kebebasan Anda dengan tidak memilih, dan Anda tidak berdosa apabila tidak memberikan suara.²⁰ (Italics dari saya)

Pemerintah sempat merasa tersinggung atas isi Surat Gembala ini, karena menilainya sebagai persetujuan kepada seseorang untuk menjadi 'golput' (golongan putih alias tidak memberi suara). Tetapi KWI atas nama Gereja Katolik Roma tetap bertahan pada sikap ini.

Sementara itu gereja-gereja Protestan atau non-Katolik, melalui Forum Komunikasi Lembaga-lembaga Gerejawi Nasional yang terdiri dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Persekutuan Injili Indonesia (PII), Gereja Bala Keselamatan, Dewan Pantekosta Indonesia (DPI), Persekutuan Baptis Indonesia (PBI), dan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, juga menerbitkan sebuah dokumen bertanggal 27 Maret 1997, "Panggilan dan Tanggungjawab Memasuki Masa Depan Bersama – Refleksi Umat Kristen Indonesia dalam rangka Merayakan Paskah dan Menyongsong Pemilihan Umum 1997". Di dalamnya dikemukakan berbagai bukti partisipasi umat Kristen dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mengisi pembangunan Indonesia; juga berbagai tindakan perusakan gedung gereja yang sangat meningkat pada kurun waktu 1996-1997. Tetapi pernyataannya dalam menyikapi Pemilu tidak setegas KWI/GKR. Bahkan umat Kristen [Protestan] dianjurkan untuk tetap datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Di situ a.l. dikatakan:

Kiranya kita menggunakan hak kedaulatan itu dengan berhati-hati dan bersungguh-sungguh, dengan bebas dan dengan mendengarkan hati nurani masing-masing yang sedalam-dalamnya. Kita dapat memahami bahwa ada di antara kita yang mengalami kesulitan dalam menentukan pilihannya. Kiranya hak-kedaulatan itu kita wujudkan pada waktunya di tempat pemungutan suara (TPS) dengan bebas tanpa rasa takut dan tidak takluk

20 KWI, *Keprihatinan dan Harapan (Surat Gembala Paskah)*. (Jakarta: KWI, 1997), 12-13.

kepada tekanan dan paksaan serta tidak termakan bujukan dan rayuan dari pihak mana pun.²¹

3. Melonjaknya Hasrat Politik Orang Kristen Indonesia pada “Era Reformasi”

Pemilu 1999

Pemilu kali ini, yang berlangsung pada awal ‘Era Reformasi’, ditandai dengan suasana yang lebih demokratis, menjunjung tinggi semangat kerakyatan, lebih kurang sama dengan suasana Pemilu 1955. Tumbang-nya rezim Soeharto dan Orde Baru pada bulan Mei 1998 membawa suasana baru bagi Indonesia, walaupun tidak mesti dan tidak segera lebih baik dibanding sebelumnya. Memang ada saja sorotan kritis bahkan sedikit sinis terhadap Pemilu 1999; misalnya mempertanyakan apakah Pemilu ini merupakan wujud demokrasi atau hanya sekadar rebutan kursi (lihat a.l. Benedanto 1999). Dan seperti yang biasa terjadi pada setiap menjelang Pemilu, masa kampanye juga ditandai oleh berbagai ketegangan, misalnya berbagai aksi mengarah kepada pelecehan dan kekerasan yang dilancarkan massa terhadap para pendukung Golkar. Toh kampanye dan Pemilu dapat berjalan dengan relatif lancar, kendati persiapannya hanya sekitar setengah tahun, terhitung sejak penetapan Sidang Istimewa MPR November 1998 hingga berlangsungnya pemungutan suara 7 Juni 1999.

Peserta Pemilu ini terdiri dari 48 partai; tiga di antaranya adalah partai-partai lama (Golkar, PPP, dan PDI), sedangkan 45 lagi merupakan partai baru atau partai lama yang sempat mati lalu dihidupkan kembali. Termasuklah di antaranya beberapa partai berlabel atau bernuansa Kristen, misalnya Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB), Partai Kristen Nasional (Krisna), dan Partai Katolik Demokrat (PKD). Tetapi dari sekitar 10 % suara umat Kristen (Protestan dan Katolik) di antara sekitar 105,8 juta suara yang sah, hanya sekitar 1 % yang diberikan kepada partai-partai berlabel Kristen itu.

Sementara di antara kalangan Kristen ada yang pro dan kontra tentang perlu-tidaknya partai politik Kristen, dapat diduga bahwa masih cukup banyak orang Kristen yang memberikan suara kepada Golkar, yang pada Pemilu ini masih berhasil menduduki peringkat kedua (meraih 22,46 % suara dan meraih 24 % kursi di DPR).²² Tetapi dapat pula diduga

21 PGI, *Panggilan dan Tangungjawab Memasuki Masa Depan Bersama – Refleksi Umat Kristen Indonesia dalam rangka Merayakan Paskah dan Menyongsong Pemilihan Umum 1997*. (Jakarta: PGI, 1997), 25.

22 Bnd. tabel-tabel pada Pax Benedanto (ed.), *Pemilihan Umum 1999: Demokrasi atau Rebutan Kursi?* (Jakarta: LSPP 1999), 89, 100-101.

kuat bahwa sebagian besar orang Kristen memberi suaranya kepada PDI Perjuangan (PDIP) yang dipimpin Megawati Soekarnoputeri. Indikasinya a.l. terlihat pada masa kampanye; ketika itu banyak pemimpin dan warga gereja mendukung dan ikut dalam kampanye PDIP.

Hadirnya para tokoh Kristen atau pemuka gereja di tengah-tengah kampanye PDIP, bahkan tercantumnya sejumlah nama mereka dalam daftar calon anggota legislatif (caleg) PDIP (misalnya nama Eka Darmaputera, seorang teolog dan gerejawan terkemuka, ataupun Jacob Tobing dan Theo Syafei, dua politisi yang dulunya adalah tokoh Golkar), mengundang pihak-pihak tertentu (diduga keras adalah kalangan Islam tertentu) untuk menyebarkan surat kaleng atau selebaran gelap, yang a.l. menyatakan bahwa PDIP telah disusupi dan dikuasai orang Kristen dan mengandung bahaya kristenisasi. Entah karena hendak membuktikan bahwa tuduhan itu tidak benar, ataupun karena alasan lain, beberapa dari mereka (termasuk Eka Darmaputera) mengundurkan diri dari caleg, sedangkan sebagian lagi tetap bertahan.

Harus diakui dan dicatat, Pemilu yang berlangsung pada masa pemerintahan transisi di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie ini penuh dengan aneka masalah dan keruwetan, a.l. paket Undang-undang Politik berkaitan dengan Pemilu yang terkesan kedodoran, bentrok antar pendukung partai, *money politic* (politik uang, jual-beli suara), termasuklah 'serangan fajar' yaitu membagi-bagi uang pada subuh menjelang hari pemungutan suara, jor-joran (perlombaan yang tidak sehat) melalui media massa, ruwet dan lambatnya proses penghitungan suara, macam-macam trik yang dihalalkan oleh para tokoh partai, caleg, dan utusan golongan untuk berebut kursi di DPR maupun MPR, cekcok sesama anggota Komite Pemilihan Umum (KPU) yang sebagian besar adalah wakil-wakil partai, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang kurang bergigi, serta berbagai pelanggaran lainnya. Karena itu pengamat tertentu menyimpulkan bahwa Pemilu ini baru sebatas pesta dan belum memberikan pendidikan politik yang berkualitas.²³ Toh mereka juga menilai bahwa Pemilu ini telah berhasil membuat kembalinya kegembiraan berpolitik di tengah rakyat Indonesia yang selama beberapa dasawarsa sebelumnya lebih banyak merasakan Pemilu sebagai paksaan. Di samping itu berbagai pihak, dari dalam dan luar negeri, juga memberi pujian dan penghargaan atas keberhasilan Pemilu ini.

Kendati yang menang dalam Pemilu ini adalah PDIP (33,76 % dari suara yang sah dan 30,8 % atau 154 kursi di DPR), tetapi dalam pemilihan Presiden 20 Oktober 1999, yang terpilih menjadi presiden pada Sidang Umum MPR 1-22 Oktober 1999 adalah K.H. Abdurrahman Wahid alias

²³ *Ibid.*, 87-88.

Gus Dur (dengan 373 suara), mengalahkan Megawati (yang hanya mendapat 313 suara). Megawati keesokan harinya terpilih menjadi wakil presiden, sehingga kekecewaan pendukungnya sedikit-banyak dapat diredam. Kita tidak dapat memantau, siapa dari kedua tokoh itu yang dipilih oleh para anggota DPR/MPR yang berasal dari partai berlabel Kristen ataupun anggota beragama Kristen yang tersebar di berbagai fraksi (yang jumlahnya sekitar 70 orang). Yang pasti, berbagai kebijakan dan pernyataan Gus Dur pada waktu ia menjadi Presiden selama 21 bulan membuat banyak kalangan Kristen mendukung dan bersimpati kepadanya, walaupun di sisi lain hal itu membuat gusar banyak kalangan Islam.

Ketika MPR mencabut mandat kepresidenan dari tangan Gus Dur pada tanggal 22 Juli 2001 berdasarkan beberapa alasan dan pertimbangan, Megawati diangkat menjadi Presiden. Karena di tubuh PDIP banyak politisi Kristen maka tidak sulit bagi kalangan Kristen untuk juga memperlihatkan dukungannya kepada Megawati. Apakah kecenderungan kalangan Kristen untuk mendukung siapa saja yang berkuasa - sejak zaman penjajahan hingga zaman merdeka - merupakan watak dasar yang melekat pada jatidirinya, masih memerlukan kajian lebih lanjut dan tidak pada tempatnya untuk dibahas di sini. Bagaimana pun juga, dapat dikatakan bahwa kalangan Kristen selalu berupaya menemukan jalan untuk mempertahankan eksistensi dan perannya di negeri ini, termasuk melalui jalur politik, a.l. melalui Pemilu.

Pemilu 2004

Pemilu 2004 ini - diikuti 24 partai politik - diselenggarakan dalam dua babak, yaitu: babak pertama (lazim disebut Pemilu Legislatif) berlangsung 5 April 2004 untuk memilih caleg (untuk DPR dan DPRD) yang diajukan oleh partai-partai peserta, dan memilih calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mengajukan diri secara individual, dan babak kedua untuk memilih secara langsung pasangan Presiden dan Wakil Presiden berlangsung 20 September 2004. Penghitungan suara untuk babak pertama telah selesai pada akhir Mei 2004. Secara resmi yang berhasil meraih suara terbanyak adalah Golkar (21,58 %), disusul PDIP (sekitar 18,53 %). Di antara 24 peserta itu hanya satu partai berlabel Kristen, yaitu Partai Damai Sejahtera (PDS) yang secara eksplisit menggunakan lambang salib, walaupun pada proses seleksi awal di Departemen Kehakiman ada tujuh partai Kristen atau yang benuansa kristiani yang lolos. Ternyata PDS hanya berhasil meraih sekitar 2,13 % suara dan hampir dapat dipastikan bahwa semua pemilihnya adalah orang Kristen. Dengan kata lain, sebagian besar orang Kristen memilih partai-partai lain.

Walaupun tidak dinyatakan dan diakui secara resmi, namun bila jumlah penduduk yang berhak dan terdaftar untuk memilih (sekitar 148 juta) dibandingkan dengan jumlah suara yang sah (sekitar 113,5 juta) maka pemenang sebenarnya dari Pemilu kali ini adalah golput, yaitu mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya (entah karena tidak datang ke TPS atau menusuk kartu pemilih dengan cara yang tidak sah sehingga suaranya dinyatakan batal), yang jumlahnya sekitar 34,5 juta, atau 23,34 % dari pemilih yang terdaftar. Kenapa begitu banyak jumlah golput, ada berbagai pendapat. Nurcholish Madjid (seorang tokoh Islam moderat), misalnya, berpendapat bahwa hal itu karena semakin banyak rakyat yang tidak melihat adanya harapan perubahan yang ditawarkan peserta Pemilu. Senada dengan itu, Hotman Siahaan, gurubesar Sosiologi dan Dekan FISIP Universitas Airlangga, berpendapat bahwa hal itu disebabkan rendahnya kepercayaan politik rakyat kepada partai-partai peserta Pemilu.²⁴

Kita tidak mungkin menghitung berapa di antara golput ini yang Kristen dan berapa pula yang memilih Golkar, PDIP, atau partai-partai lainnya. Karena Pemilu ini berlangsung dalam suasana yang relatif demokratis, memang gereja-gereja pada umumnya menyerukan agar warganya menentukan pilihannya secara bertanggungjawab dan sebaiknya tidak menjadi golput. Tetapi kita tidak dapat memantau dan mengukur berapa yang menaati anjuran itu. Yang dapat dikatakan adalah, suara umat Kristen yang sekitar 10 % dari jumlah penduduk yang berhak memilih itu tersebar di berbagai partai atau golongan (termasuk golput).

Sementara itu PDS, karena tidak berhasil meraih jumlah suara minimal (*electoral threshold*) 3 % yang dipersyaratkan untuk boleh menampilkan Ketua Umumnya (Pdt. Ruyandi Hutasoit) sebagai calon Presiden, maka segera setelah perhitungan hasil Pemilu legislatif rampung dan menjelang penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu babak kedua, menyatakan bahwa PDS mendukung pasangan Megawati dan Hasyim Muzadi sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. Tetapi sama seperti fenomena yang terlihat pada beberapa partai atau organisasi Islam (misalnya NU), para pemilih PDS pada Pemilu legislatif April 2004 ternyata tidak semuanya memilih Megawati dan Hasyim Muzadi pada Pemilu babak kedua putaran pertama 5 Juli 2004; justru banyak dari mereka yang memilih Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla (SBY & JK).²⁵ Padahal kedua tokoh ini dikenal sebagai Islam yang saleh dan cukup dekat dengan kalangan NU, walaupun bukan berada di lingkaran

24 *Harian Kompas*, 7 Mei 2004, 6.

25 *Harian Kompas*, 8 Juli 2004.

dalam. Kalau alasannya adalah bahwa NU melalui Gus Dur cukup dekat dengan kalangan Kristen, maka mestinya kalangan Kristen, termasuk pemilih PDS, memilih pasangan Megawati dan Hasyim Muzadi, atau pasangan Wiranto dan Solahuddin Wahid, karena Hasyim Muzadi adalah Ketua Umum NU dan Solahuddin Wahid adalah adik kandung Gus Dur serta calon dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kelahirannya ikut dibidani oleh NU dan Gus Dur. Mungkin alasannya adalah karena di antara calon anggota badan legislatif (caleg) dari Partai Demokrat cukup banyak yang Kristen.

Dengan kata lain, tidak mudah menebak ke arah mana minat dan kecondongan politik orang Kristen pada Pemilu 2004 ini. Dan pada putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung 20 September 2004 pastilah tidak mudah juga bagi orang Kristen untuk menentukan pilihan di antara dua pasangan yang menang pada putaran pertama, apakah Susilo Bambang Yudhoyono & Jusuf Kalla atau Megawati & Hasyim Muzadi. Memang Eka Darmaputera dalam sebuah makalahnya pada Pertemuan Gereja-gereja di Jakarta 26 Juni 2004 - berdasarkan beberapa alasan, kriteria dan pertimbangan - menyatakan bahwa ia akan memilih Megawati & Hasyim Muzadi.²⁶ Makalahnya itu juga disebarluaskan, termasuk melalui internet. Tetapi kita tidak dapat menjamin, bahkan menebak pun sulit, apakah orang Kristen Indonesia akan mengikuti pendapat dan pilihan Eka atau tidak.

Sementara itu kalangan Islam tertentu, misalnya sebelas organisasi masyarakat (ormas) Islam, a.l. Muhammadiyah, pada tanggal 13 Juli 2004 menyatakan bahwa mereka tidak akan memilih pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua September 2004 ini, alias akan menjadi golput, dengan alasan bahwa tidak satu pun dari dua pasangan yang maju itu yang sungguh-sungguh punya komitmen yang kuat untuk memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).²⁷ Alasan yang lebih kuat agaknya adalah karena jago mereka, pasangan Amien Rais & Siswono Yudohusodo, tidak maju ke putaran kedua. Sejalan dengan itu Syamsudin Harris, seorang peneliti dari LIPI, memperkirakan bahwa pada Pemilu presiden & wapres putaran kedua ini jumlah golput akan meningkat menjadi sekitar 30 %. Dapat diduga, di antara golput ini ada juga orang Kristen, tetapi dapat diduga bahwa kebanyakan orang Kristen ikut memilih satu dari dua pasangan yang maju itu.

Setelah hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua 20 September 2004 diumumkan KPU tanggal 4 Oktober 2004, hasilnya adalah sbb.: Di antara 114.257.054 suara yang sah (sedikit meningkat

26 Eka Darmaputera, "Punai di tangan atau burung di udara? - Mengapa saya memilih Mega?" (2004, makalah, tidak diterbitkan).

27 ANTV, 13 Juli 2004.

dibanding putaran pertama), 69.266.350 suara (60,62 %) memilih pasangan SBY & JK, sedangkan yang memilih pasangan Megawati dan Hasyim Muzadi hanya 44.990.704 suara (39,38 %). Dengan demikian Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi Presiden RI yang ke-6, didampingi Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden, dan dilantik oleh MPR pada tanggal 20 Oktober 2004.

Tidak mudah untuk memantau dan menghitung dengan cermat berapa banyak atau berapa persen orang Kristen yang memilih SBY & JK, dan tidak dapat juga dipastikan bahwa orang Kristen yang memilih SBY & JK lebih banyak dibanding dengan yang memilih Megawati dan Hasyim Muzadi. Tetapi melalui pengamatan sepintas, ternyata cukup banyak juga orang Kristen yang memilih SBY & JK, terutama karena mereka (terutama ibu-ibu) mengagumi figur SBY yang gagah itu. Sempat pula beredar isu bahwa isteri SBY adalah seorang Kristen karena namanya adalah Kristiani (lengkapnya Kristiani Herrawaty). Akronim SBY pun sempat juga diberi kepanjangan 'Senang Bersama Yesus', dan tampaknya 'plesetan' ini cukup efektif untuk menggaet suara orang Kristen. Isu seperti ini segera disanggah oleh SBY, sambil menegaskan bahwa ia adalah seorang Muslim sejati. Boleh jadi sanggahan ini berkait juga dengan kenyataan bahwa hampir tidak ada orang Kristen yang duduk di dalam kabinet yang diumumkan SBY pada malam hari sesudah pelantikannya 20 Oktober 2004 itu.

Pemilu 2009

Riuh-rendah Pemilu 2009 masih sedang berlangsung ketika artikel ini mulai ditulis. Kesibukan mempersiapkannya sudah dimulai paling tidak sejak tahun 2007. Selain kesibukan pemerintah dan DPR mempersiapkan perangkat hukumnya, juga kesibukan partai-partai politik agar lolos dari verifikasi KPU dan mendapat hak untuk menjadi peserta. Bahkan berbagai organisasi dan lembaga non-pemerintah yang memahami dirinya ikut bertanggung jawab, termasuk lembaga-lembaga keagamaan Kristen, ikut ambil bagian dalam kesibukan itu. Ada berbagai kegiatan dan program yang disiapkan dan dijalankan demi untuk terlaksananya Pemilu dengan baik.

PGI, misalnya, menyelenggarakan serangkaian Pendidikan Politik (I: 21-25 Mei 2007 di Jakarta; II: 28 Oktober – 1 November 2007 di Manado; dan III: 21-24 Oktober 2008 di Palangkaraya). Tujuannya bukan untuk melibatkan diri dalam politik praktis (misalnya membentuk atau mendukung partai politik tertentu, ataupun menyiapkan calon-calon kepala daerah ataupun calon anggota legislatif/caleg, termasuk DPD), melainkan mempersiapkan dan membekali pelayan dan warga gereja di lingkungan PGI agar menjalankan hak dan kewajiban politik mereka secara cerdas dan bertanggungjawab, didasarkan pada prinsip bahwa

Yesus juga memberi perhatian serius terhadap dunia politik, sehingga gereja dan orang Kristen juga memiliki tanggungjawab politik, yaitu ikut mengupayakan dan meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negaranya (bnd. Yeremia 29:7 dan Lukas 4:18-19). Pada gilirannya PGI Wilayah (yakni persekutuan gereja-gereja di aras provinsi) maupun gereja-gereja anggota PGI juga menyelenggarakan program sejenis. Sejumlah gereja dan lembaga-lembaga gerejawi lain - misalnya PGLII yang menghimpun gereja-gereja beraliran Injili, dan PGPI yang menghimpun gereja-gereja beraliran Pentakostal - juga ikut sibuk meramaikan Pemilu 2009. Bahkan ada gereja tertentu yang secara terus terang menyatakan diri sebagai pendiri dan pendukung partai politik tertentu, dan berkampanye agar warganya memilih partai dan caleg dari partai itu.

Di dalam berbagai keputusan dan pernyataannya, PGI dan KWI menyatakan dengan tegas bahwa kedua lembaga gerejawi ini tidak memihak atau mendukung partai politik tertentu (termasuk yang berlabel Kristen atau Katolik) dan tidak akan mendorong warga gereja untuk memilih salah satu dari mereka. Bahkan dalam "Seruan Bersama PGI dan KWI dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2008", tertanggal Oktober 2008, a.l. ditegaskan:

Dalam upaya menjaga netralitas dan objektivitas pelayanan gerejawi maka pimpinan Gereja/Jemaat tidak dapat merangkap sebagai pengurus partai politik. Amanat Tuhan agar umat-Nya menjadi garam dan terang dunia dapat dijalankan dalam wadah kekuatan-kekuatan sosial-politik yang berlain-lainan, sesuai dengan hati nurani dan pilihan yang jujur dari masing-masing anggota jemaat dan Gereja.

Dalam rangka memilih orang-orang yang tepat, dalam seruan bersama itu umat Kristen diingatkan juga pada isi nas Alkitab (Keluaran 18:21), "pilihlah dari antara mereka orang-orang yang cakap, setia, dan takut akan Tuhan, dipercaya, dan benci pada pengejaran suap. ..."

Menindak-lanjuti berbagai kegiatan dalam mewujudkan tanggungjawab politiknya, pada tanggal 17-21 November 2008 PGI menyelenggarakan Konferensi Gereja dan Masyarakat (KGM) VIII. Menyangkut Pemilu 2009, KGM ini a.l. memberi rekomendasi:

Gereja perlu mendorong warga masyarakat untuk menggunakan hak politiknya dalam Pemilu 2009, sambil menggaris-bawahi seruan PGI & KWI tentang Pemilu. *Pertama*, perlu disadari bahwa melalui peristiwa Pemilu hak-hak asasi setiap warga negara di bidang politik diwujudkan. Oleh karena itu, setiap warga negara patut menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab dan dengan sungguh-sungguh mendengarkan suara hati nuraninya. Bagi rakyat, Pemilu pada hakikatnya adalah sebuah proses kontrak politik dengan mereka yang bakal terpilih. Tercakup di dalamnya kewajiban mereka yang terpilih untuk melayani rakyat, dan sekaligus kesediaan untuk dikoreksi oleh rakyat. Keinginan dan cita-cita bagi adanya perubahan serta perbaikan

kehidupan bangsa dan negara dapat ditempuh antara lain dengan memperbaharui dan mengubah susunan para penyelenggara negara.²⁸

Di tengah kesibukan itu banyak diadakan diskusi, apakah orang Kristen Indonesia perlu membentuk dan memiliki partai politik tersendiri, atau lebur di dalam berbagai partai politik yang sudah ada, terutama yang bercorak nasionalis. Terlihat pro dan kontra terhadap hal ini, dengan argumen masing-masing. Sementara pro-kontra itu berlangsung, pada masa persiapan Pemilu 2009, yaitu pada tahap pendaftaran partai-partai politik peserta, terdapat sekitar 10 partai berlabel Kristen. Banyak di antara pengurusnya adalah pejabat gereja tertentu. Mungkin karena pada waktu itu "Seruan Bersama PGI dan KWI" itu belum terbit, atau walaupun sudah terbit, mereka tidak merasa terikat atau tidak merasa perlu untuk menjalankannya.

Setelah KPU mengumumkan daftar partai peserta Pemilu 2009 yang definitif pada Januari 2009, yang memuat nama 38 partai beraras nasional, ternyata partai berlabel Kristen yang lolos verifikasi hanya dua, yaitu Partai Damai Sejahtera (PDS, no. 25) dan Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI, no. 32). Kedua partai ini tentu berharap bahwa orang Kristen Indonesia akan memilih mereka, agar - paling tidak - mereka bisa mencapai jumlah suara pemilih minimal 2.5 %, yakni angka *parliamentary threshold*, sehingga wakil mereka dapat duduk di DPR dan/atau DPRD.

Pemilu 2009 tahap pertama, yakni Pemilu Legislatif (pemilihan partai politik dan para calegnya, serta anggota DPD dari masing-masing provinsi), telah berlangsung tanggal 9 April 2009. Pada Pemilu Legislatif terjadi dan terlihat berbagai kekisruhan (a.l. puluhan juta warga negara yang memiliki hak untuk memilih, tetapi tidak dapat memilih karena nama mereka tidak tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap/DPT). Terlepas dari berbagai kekisruhan itu, berdasarkan pengumuman KPU pada tanggal 9 Mei 2009²⁹ terlihat bahwa jumlah penduduk Indonesia yang sebenarnya berhak memilih adalah 171.265.442. Di antara jumlah itu, yang tidak menggunakan hak pilihnya - entah karena secara sadar menjadi 'golput' ataupun karena namanya tidak tercatat pada DPT - berjumlah 49.677.076, atau 29.01 %. Dengan demikian yang menggunakan haknya adalah 121.588.366. Diantara itu terdapat 17.488.581 suara yang tidak sah, sehingga jumlah suara yang sah di antara seluruh suara penduduk Indonesia yang sebenarnya berhak memilih hanyalah **104.099.785** (sekitar 60 %). Tabel berikut ini dapat menolong kita melihat rinciannya:

28 Jan S. Aritonang & Gomar Gultom (peny.), Tuhan Itu Baik kepada Semua Orang - Hasil Konferensi Gereja dan Masyarakat VIII-PGI, Cipayung-Bogor, 17-21 November 2008. (Jakarta: PGI, 2009), 216.

29 Antara lain dimuat pada harian Kompas 10 Mei 2009.

Hasil Pemilu Legislatif 2009

Jumlah penduduk yang berhak memilih	171.265.442
Jumlah penduduk yang tidak menggunakan hak pilih	49.677.076
Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih	121.588.366
Jumlah suara yang tidak sah	17.488.581
Jumlah suara yang sah	104.099.785

Dari antara 38 partai politik peserta, yang lolos dari *parliamentary threshold* hanyalah sembilan partai. Berdasarkan suara yang sah, urutannya adalah sbb.: Partai Demokrat - partainya SBY (20,85 %), Golkar (14,45 %), PDIP (14,03 %), PKS (7,88 %), PAN (6,01 %), PPP (5,32 %), PKB (4,94 %), Gerindra (4,46 %), dan Hanura (3,77 %). Sisa 18,29 % dibagi oleh 29 partai yang tidak lolos dari *parliamentary threshold*. Melihat angka-angka di atas, 'pemenang' yang sebenarnya - sama seperti Pemilu 2004 - adalah penduduk yang tidak menggunakan hak pilihnya, yaitu golput bersama mereka yang di'golput'kan itu.

Kedua partai berlabel Kristen tersebut di atas tidak termasuk di dalamnya. PDS - yang sempat memasukkan beberapa tokoh Islam sebagai calegnya - memperoleh suara sah 1,48 % (1.541.592 suara) dan PKDI memperoleh 0,31 % (324.553 suara). Akibatnya wakil mereka tidak dapat duduk di DPR. Kalau jumlah suara orang Kristen ada sekitar 10 % dari jumlah suara yang sah (sekitar 10,4 juta) maka sebagian besar (sekitar 8,5 juta) orang Kristen yang ikut memilih dan yang suaranya sah justru menyalurkan aspirasi politik melalui partai-partai lain. Dapat diduga, sebagian besar suara orang Kristen diberikan kepada partai pemenang I, II dan III tersebut di atas (selain sejumlah kecil suara diberi ke beberapa partai lain, misalnya Gerindra). Itu berarti bahwa sebagian besar orang Kristen Indonesia tidak melihat kedua partai berlabel Kristen itu sebagai saluran aspirasi politik mereka pada waktu Pemilu.

Pemilu tahap kedua berupa Pemilihan Presiden (Pilpres) sudah berlangsung 8 Juli 2009. Dari tiga pasangan: Susilo Bambang Yudhoyono & Boediono, Jusuf Kalla & Wiranto, dan Megawati Soekarnoputri & Prabowo Subianto, yang mendapat suara terbanyak (60.80 %) adalah pasangan SBY & Boediono; karena pasangan ini menang mutlak, tidak akan ada lagi putaran kedua. Sulit ditebak ditebak, orang Kristen Indonesia (termasuk Katolik) sebagian besar memilih siapa. Mengingat Pemilu 2004, kuat dugaan sebagian besar mereka memilih pasangan SBY &

Boediono, apalagi karena SBY tidak jadi berpasangan dengan calon wakil presiden dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang di mata umat Kristen Indonesia cukup mengundang bahaya bagi masa depan negeri ini.

4. Penutup

Mengacu pada seruan bersama PGI dan KWI di atas, di satu sisi tampaknya sebagian besar umat Kristen Indonesia cukup sadar bahwa “amanat Tuhan agar umat-Nya menjadi garam dan terang dunia dapat dijalankan dalam wadah kekuatan-kekuatan sosial-politik yang berlain-lainan, sesuai dengan hati nurani dan pilihan yang jujur dari masing-masing”. Tetapi di sisi lain mereka juga sadar bahwa mereka harus menyikapi - walaupun tidak sampai berhasil mengimbangi - kiprah dan manuver politik kalangan Islam yang mengarah ke negara [berdasar] Islam. Itu mereka lakukan dengan cara menyalurkan aspirasi politik atau memberi suara mereka kepada partai dan calon presiden & wakil presiden yang menurut mereka berjiwa atau berideologi nasionalisme (antara lain tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara), misalnya Partai Demokrat, Golkar, PDIP, dan Gerindra serta calon-calon mereka.

Pemilu tentu bukan satu-satunya indikator ataupun barometer minat dan pilihan politik umat Kristen Indonesia. Tetapi Pemilu dapat menjadi salah satu momen yang menggambarkan kesadaran politik umat Kristen di negeri ini, kendati - seperti telah dikemukakan di atas - ternyata tidak mudah untuk melihat dengan jelas siapa atau partai manakah yang lebih digandrungi oleh kalangan Kristen. Sehubungan dengan ini kita juga melihat bahwa ada-tidaknya partai [berlabel] Kristen tidak sangat signifikan dalam menyalurkan aspirasi politik Kristen di negeri ini. Dari angka-angka yang terlihat di atas, ternyata sebagian besar umat Kristen di negeri ini tidak menyalurkannya melalui partai-partai Kristen.

Tentang perlu-tidaknya partai Kristen di negeri ini pun para teolog dan pemuka Kristen berbeda pendapat. Karena kita hidup dalam alam demokrasi maka perbedaan itu patut dihargai. Tetapi jelas jugalah bagi kita bahwa iman atau kekristenan seseorang tidak dapat diukur dari pilihannya: menyalurkan aspirasi politik melalui partai Kristen atau partai lain, atau bahkan melalui pilihan menjadi golput. Yang penting adalah bahwa apapun pilihan setiap orang Kristen, ia dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkannya secara kristiani.

*) **Jan S. Aritonang**

Doctor of Theology dari the South East Asia Graduate School of Theology (SEAGST) Singapore 1987, dan Ph.D. dari Universiteit Utrecht - Nederland 2000. Sejak 1988 menjadi dosen tetap bidang studi utama Sejarah Kekristenan di STT Jakarta, dan menjabat Ketua di sekolah tinggi itu pada periode 1995-1999 dan 2007-2011. Juga bertugas sebagai salah seorang Ketua PGI periode 2004-2009. E-mail: jan_aritonang@yahoo.com

BIBLIOGRAFI

- Aritonang, Jan S. 2003. "Kiprah Kristen dalam Sejarah Perpolitikan di Indonesia", dalam *Jurnal Teologi Proklamasi*, edisi no. 4/Th. 2/September 2003, h. 5-49.
- . 2004. *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- & Gomar Gultom (peny.). 2009. *Tuhan Itu Baik kepada Semua Orang – Hasil Konferensi Gereja dan Masyarakat VIII-PGI, Cipayung-Bogor, 17-21 November 2008*. Jakarta: PGI.
- Benedanto, Pax (ed.). 1999. *Pemilihan Umum 1999: Demokrasi atau Rebutan Kursi?* Jakarta: LSPP.
- Darmaputera, Eka. 2004. "Punai di tangan atau burung di udara? – Mengapa saya memilih Mega?" (makalah, tidak diterbitkan)
- Feith, Herbert. 1999. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia* (terj.). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- "Golput Menang Pemilu karena Rakyat Putus Asa", *Kompas* 7 Mei 2004, h. 6.
- Hoekema, A.G. 1997. *Berpikir dalam Keseimbangan yang Dinamis: Sejarah Lahirnya Teologi Protestan Nasional di Indonesia sekitar 1860-1960* (terj.). Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- van Klinken, G. 2003. *Minorities, Modernity and the Emerging Nation – Christians in Indonesia, a biographical approach*. Leiden: KITLV, 2003.
- KWI. 1997. *Keprihatinan dan Harapan (Surat Gembala Paskah)*. Jakarta: KWI.
- Liddle, William R. 1994. *Pemilu-Pemilu Orde Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Ngelow, Zakaria J. 1994. *Kekristenan dan Nasionalisme: Perjumpaan Umat Kristen Protestan dengan Pergerakan Nasional Indonesia 1900-1950*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- PGI. 1997. *Panggilan dan Tanggungjawab Memasuki Masa Depan Bersama – Refleksi Umat Kristen Indonesia dalam rangka Merayakan Paskah dan Menyongsong Pemilihan Umum 1997*. Jakarta: PGI.
- Sairin, Weinata dan Koernia Atje Soejana (peny.), *Selama Hari Masih Siang*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1976.
- "Seruan Bersama PGI dan KWI dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2008", Oktober 2008.
- Risalah Perundingan Konstituante Republik Indonesia tahun 1957*, V
- Simorangkir, J.C.T. 1989. *Manuscript Sejarah Parkindo*. Jakarta: Yayasan Komunikasi.
- Webb, R.A.F. 1978. *Indonesian Christians and Their Political Parties 1923-1966: The Role of Parkindo and Partai Katolik*. Townsville: James Cook University.